

Pintu Perlintasan Kereta di Pasar Rangkasbitung Ditutup Permanen

LEBAK (IM)- Perlintasan Jalur Langsung (PJJ) atau pintu perlintasan kereta api di dekat Pasar Rangkasbitung ditutup secara permanen, lantaran Stasiun KAI Rangkasbitung akan dibangun oleh Kemenhub. Penutupan perlintasan masuk Stasiun tersebut dilakukan pada malam tadi tepatnya pukul 00:00 WIB oleh Pemkab Lebak dan Kemenhub RI.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lebak, Rully Edward mengungkapkan, penutupan PJJ dekat pasar Rangkasbitung karena Stasiun Rangkasbitung akan dibangun oleh Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. "Pemkab Lebak meminta untuk pintu stasiun dipindahkan ke arah Jalan Sunan Kalijaga," ungkapnya, Selasa (1/8).

Dikatakannya, penutupan secara permanen menjadi keinginan Pemkab Lebak agar akses keluar masuk pengguna kereta hanya satu pintu melalui Jalan Sunan Kalijaga. "Jadi ke depannya keluar masuk akan melalui Jalan Sunan Kalijaga," katanya.

Dijelaskan Rully, tujuan penutupan perlintasan KAI tersebut selain Stasiun KAI akan dibangun, juga sebagai penataan kawasan. Jadi, ke depan PJJ hanya satu pintu melalui Jalan Sunan Kalijaga. "Terminal Kalijaga biar hidup, selian itu sebagai konektivitas antar Moda, serta tidak ada lagi kendaraan angkutan yang ngetem di kawasan jalan Hadiwinangun," ujarnya.

Rully menambahkan, pihaknya pun akan terus membangun koordinasi dengan Instansi terkait lainnya, dalam melakukan penataan di kawasan tersebut. "Ya pada intinya kita lakukan penataan, supaya angkutan umum lebih tertib lagi dan terminal Kalijaga hidup," tambahnya. ● **pra**

Pemkot Bogor Optimistis Jembatan Otista Selesai November 2023

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota Bogor (Pemkot Bogor) optimistis pembangunan ulang Jembatan Otista di pusat Kota Bogor, dapat selesai pada November 2023. Target tersebut lebih cepat satu bulan karena sebelumnya Pemkot Bogor menargetkan proyek selesai akhir tahun 2023 pada bulan Desember.

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina mengungkapkan, saat ini progres pembangunan telah memasuki konstruksi pondasi jembatan utama sambil menunggu sambungan jembatan pada awal September. "Jadi progresnya 25,33 persen sampai minggu keempat kemarin, masih aman dan cenderung cepat, kita optimis cepat selesai," ungkap Rena, kemarin.

Di sisi lain, kata Rena, hasil dari kunjungan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang memberi masukan mengenai estetika desain jembatan juga bisa dikerjakan. Koreksi Ridwan Kamil, di antaranya lampu yang tidak polos, melainkan ada motif kujang dan jembatan yang memiliki warna merah.

Ridwan Kamil pun berharap agar dapat menyaksikan peluncuran Jembatan Otista dengan desain dan kapasitas baru pada akhir tahun 2023. ● **pra**



GERAKAN PEMBAGIAN BENDERA MERAH PUTIH JELANG HARI KEMERDEKAAN

Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan (tengah) memberikan bendera merah putih kepada pedagang di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/8). Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan gerakan membagikan bendera putih kepada warga serentak di 40 Kecamatan dan menghimbau warga untuk memasang bendera tersebut mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2023.

Banjir Diskon Pajak PBB dan BPHTB di Kota Tangerang Spesial HUT ke-78 RI

Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya karena pajak yang dibayarkan masyarakat ditujukan bagi pembangunan dan kemaslahatan masyarakat juga, kata Kepala Bapenda Kota Tangerang, Kiki Wibhawa.

TANGERANG (IM)- Pemerintah (Pemkot) Kota Tangerang memberikan diskon besar-besaran untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang berlaku mulai 1 hingga 31 Agustus 2023. Kesempatan diskon ini dalam rangka menyambut Hari Ulang

Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia, dengan harapan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Kota Tangerang.

Kepala Bapenda Kota Tangerang, Kiki Wibhawa memaparkan, diskon ini akan mengurangi beban masyarakat lantaran menghapus denda bebas sanksi PBB 1994-2022, kemudian terhitung PBB-P2 tahun 1994-2014

diberikan diskon sebesar 50 persen. Lalu, Pajak BPHTB PRONA / PTSL/ PTIKI, diberikan diskon sebesar 25 persen.

"Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya karena pajak yang dibayarkan masyarakat ditujukan bagi pembangunan dan kemaslahatan masyarakat juga," ujarnya dikutip Selasa (1/8).

Adapun terkait pembayaran, selain melalui loket pun dapat menggunakan berbagai merchant atau e-merchant, seperti loket Bank BJB, Aplikasi BJB Digi, Aplikasi Tangerang LIVE, Alfamart, Indomaret, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, Blibli, LinkAja, Ovo, Qris, Gopay, hingga Kantor Pos Indonesia.

Untuk pelayanan informasi terkait diskon pajak, Kiki mempersilahkan masyarakat Kota Tangerang agar mengakses seluruh media sosial Bapenda di antaranya @bapenda_tangerangkota, Facebook Bapenda Tangerang, Youtube Bapenda Channel, dan Website di laman bapenda.tangerangkota.go.id atau https://pbb.tangerangkota.go.id/.

3. Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Satria Sudirman, RT 02, RW 01, Sukaasih, Kecamatan Tangerang.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang, Arief R Wisnansyah meminta seluruh warga Kota Tangerang dapat berpartisipasi dalam program diskon spesial HUT ke-78 RI tersebut. Pasalnya, hal itu sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan dari Kota Tangerang.

"Dengan diskon ini, diharapkan masyarakat semakin semangat membayar pajak bangunannya, karena partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pajak ini tak lain untuk peningkatan infrastruktur kota dan tentunya demi kesejahteraan kita bersama," tukasnya. ● **pp**

Sambut HUT RI, DKP Kota Tangerang Gelar Vaksinasi Rabies Gratis

TANGERANG (IM)- Berbagai kegiatan dilakukan pemkot Tangerang dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 tahun. Salah satunya yakni vaksinasi rabies gratis akan digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang Mudhorun mengatakan, kegiatan vaksinasi rabies tersebut rencana pelaksanaannya akan dilakukan di berbagai lokasi, seperti di Taman Cibodas, pusat perbelanjaan Metropolitan Town Square dan pasar pangan murah Jatiuwung.

Mudhorun mengatakan, event tersebut bertujuan untuk

mencegah penyakit rabies pada hewan yang langsung berkontak dengan manusia. Terlebih Kota Tangerang menyandang predikat status zero case rabies. "Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah penyakit rabies pada hewan yang langsung berkontak dengan manusia," ujarnya, kemarin.

Mudhorun mengatakan,

untuk kegiatan vaksinasi rabies akan dilaksanakan di Metropolis Town Square pada 2 Agustus, di Taman Cibodas pada 8 Agustus dan di Kecamatan Jatiuwung akan dilakukan pada 10 Agustus 2023.

"Untuk di Kecamatan Jatiuwung pelaksanaannya berbarengan dengan gelar pangan murah pada 10 Agustus

2023," tambahnya.

Sekadar diketahui, selama even tersebut berlangsung Pemkot Tangerang menyediakan kuota sebanyak 50 ekor binatang. Untuk menikmati layanan tersebut, para pemilik binatang dapat melakukan pendaftaran melalui <http://bit.ly/vaksinasi-rabiesdkp>. ● **pp**

Cegah Stunting, Pemkab Lebak Ajak Warga Konsumsi Ikan dan Telur

LEBAK (IM)- Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mengajak masyarakat di daerah ini mengonsumsi ikan dan telur untuk mencegah stunting atau gagal tumbuh pada anak akibat kurang asupan gizi.

"Kami berharap masyarakat dapat mengkonsumsi ikan dan telur," kata Wakil Bupati, Ade Sumardi di Lebak, kemarin.

Pemerintah Kabupaten Lebak mengoptimalkan sosialisasi dan kampanye agar masyarakat gemar mengkonsumsi telur dan ikan, karena mampu menurunkan angka stunting sekaligus mencegah kekerdilannya tersebut.

"Saya kira gizi yang terkandung pada ikan dan telur itu benar-benar bagus dan bisa mencegah stunting," katanya menjelaskan.

Saat ini, pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan perusahaan unggas dan setiap bulan membagikan telur kepada masyarakat.

Selain itu juga Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI menyalurkan daging unggas dan telur sebanyak 1 kilogram pada keluarga rawan stunting.

Penyaluran bantuan telur dan daging itu melibatkan PT Pos Indonesia untuk penyaluran ke titik-titik lokasi penerima.

Ia menjelaskan, untuk mendukung peningkatan konsumsi ikan, Pemprov Banten menerbitkan ikan tawar jenis patin di sejumlah bendungan dan embung di Kabupaten

Lebak yang nantinya masyarakat bisa mengambil ikan tersebut.

"Kami berharap masyarakat dapat mengkonsumsi telur, ikan dan daging sehingga status gizi warga menjadi baik," kata Ade Sumardi yang juga Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Lebak.

Ade mengatakan, berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi anak stunting di Lebak sebesar 27,5 persen yang artinya dari 100 anak yang ada di Lebak, 27 di antaranya mengalami stunting.

Namun demikian, jumlah penanganan stunting di Kabupaten Lebak berjalan baik setelah dilakukan pengukuran tubuh pada Mei 2023 kepada 108 ribu balita yang dinyatakan stunting berdasarkan "by name by adress" atau sesuai nama dan alamat tercatat 3.736 balita, padahal tahun sebelumnya 4.618 orang.

"Kami meyakini angka prevalensi stunting dipastikan menurun 14 persen sesuai target Presiden Joko Widodo pada 2024," kata Ade.

Sementara Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, dr Nurul Isnaeni mengatakan lebih efektif pencegahan stunting itu dibudayakan mengkonsumsi ikan dan telur karena mengandung gizi banyak.

Kandungan protein pada telur dan ikan cukup bagus untuk pertumbuhan perkembangan pada otak. ● **pra**

Komisi II Geram, Serapan APBD Banten Masih Rendah

SERANG (IM)- Sekretaris Komisi II DPRD Banten, Oong Syahroni, mengaku geram dengan kinerja Pemprov Banten yang dinilai belum optimal dalam menyerap APBD Banten Tahun Anggaran 2023.

Sebab, kata Oong, hingga serapan APBD Banten masih sangat rendah. Hal itu tentunya menyebabkan banyak program pembangunan maupun program yang menyentuh langsung masyarakat terganggu.

"Hari ini Komisi II melakukan rapat koordinasi selama dua hari dengan tujuh mitra kerja. Rakor ini digelar terkait serapan anggaran 2023 yang sejauh ini secara umum serapan anggarannya kita belum optimal," kata Oong saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (1/8).

Oong mengatakan, ber-

dasarkan laporan yang dirinya terima, lambatnya penyerapan anggaran disebabkan oleh adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Pejabat (Pj) Sekda Banten yang saat ini masih diolah di M Tranggono.

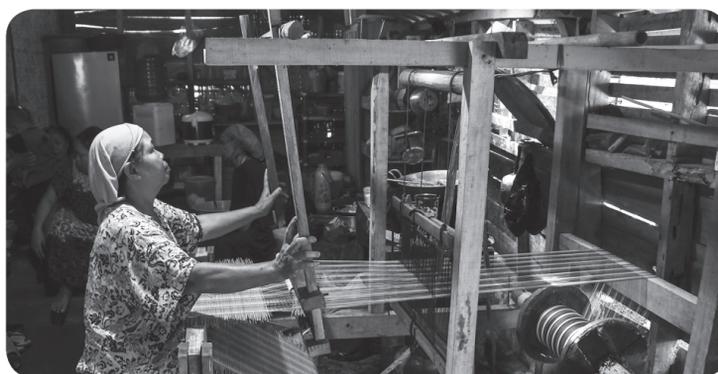
"Surat edaran terkait optimalisasi dari Pj Sekda yang dulu ini juga jadi salah satu faktor yang menghambat sarapan anggaran. Oleh sebab itu hari ini dipandang perlu kami untuk minta penjelasan dari kepala OPD per triwulan kedua ini," katanya.

Komisi II yang membidangi bidang perekonomian memanggil beberapa OPD yang jadi mitra kerja untuk memberikan kejelasan dan laporan tentang serapan APBD dan program yang sudah terlaksana pada triwulan

semester II ini.

"Kita ingin tau udah masuk semester kedua ini serapan anggarannya seperti apa, kita akan tahu sebagai bahan evaluasi kita karena kita tidak mau nanti ketika serapan ini rendah berdampak terhadap SiLPA yang tinggi," ucapnya.

Menurutnya, tingginya SiLPA tentunya akan menjadi kerugian bagi masyarakat dan catatan khusus bagi Pemprov Banten. Sebab, dengan tingginya SiLPA maka akan banyak program yang telah direncanakan tidak terlaksana dengan baik. "Kita tidak mau tau bahwa silpa harus dapat kita tekan seminimal mungkin, jangan sampai membengkak. Karena yang akan dirugikannya adalah masyarakat," pungkask politisi partai Gerindra ini. ● **pra**



PRODUKSI TIKAR MENDONG

Perajin menenun tikar mendong di Desa Margaluyu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (1/8). Dalam sebulan perajin memproduksi tikar mendong dan bahan baku kerajinan setengah jadi untuk diekspor ke Jepang sebanyak 40 kodi yang dikerjakan oleh 40 orang ibu rumah tangga, dengan omset yang didapat mencapai Rp860 ribu per kodi.



PENYALURAN BANTUAN AIR BERSIH DI SEMARANG

Seorang warga mengangkat galon berisi air se usai penyaluran bantuan air bersih di daerah krisis air bersih di Kelurahan Jabungan, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (1/8). Selama dua bulan lebih warga di daerah tersebut kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau, dan bergantung pada bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk keperluan air bersih sehari-hari.

Gubernur Buka Opsi Cari Lahan Baru untuk Gereja yang Ditembok di Jambi

JAMBI (IM)- Gubernur Jambi, Al Haris berjanji akan mencarikan solusi atas konflik gereja Pentakosta di Muaro Jambi yang ditembok pemilik lahan. Al Haris membuka opsi mencarikan lahan lain untuk gereja tersebut.

Hal itu dikatakan Al Haris menanggapi konflik gereja dan warga tersebut. Ia mengatakan akan segera turun ke lokasi untuk bertemu dan memediasi kedua belah pihak. "Insya Allah Rabu (2/8) siang saya akan turun ke sana. Kita akan bantu carikan solusinya," kata Al Haris, kemarin.

Jika mediasi nantinya tetap tak membuahkan hasil, Al Haris menawarkan opsi untuk mencarikan lahan baru bagi gereja tersebut agar para jemaat bisa beribadah. Namun sebelumnya, ia mengaku akan mendalami lebih dulu duduk perkara konflik tersebut hingga akses jalan menuju gereja ditembok oleh pemilik lahan.

"Nanti kita turun, kita ingin tahu duduk perkaranya dulu. Kalau nanti warga di sana bisa diajak berdiskusi dan dilunakkan, nanti kan bisa ada solusi," lanjut Al Haris. "Kita coba carikan lahan di mana nanti bagusnya. Yang jelas kita turun dulu biar tahu persoalannya," tegasnya.

Sebelumnya, mediasi antara kedua belah pihak sempat dilakukan di Kecamatan Sungai Bahar, Muaro Jambi. Namun, belum ada titik terang. Bahkan anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Robinson Sirait yang turut hadir dalam mediasi tersebut pun menyampaikan akan berkomunikasi dengan pihak BPN untuk mencari kemungkinan gereja bisa mendapatkan akses sosial berupa jalan.

Di tingkat desa, juga sempat dilaksanakan mediasi di Desa Sukamakmur. Namun sama, tak ada hasil. Sementara pihak Kecamatan memastikan sertifikat lahan dan perizinan lainnya benar menjadi pemilik lahan atau penembok akses jalan tersebut.

"Memang soal izin lahan ini kan hak milik pemilik lahan ya. Kalau mereka tak mau menjual ya gimana? Karena ini juga merupakan lahan sekitar perkebunan, jadi milik pribadi," kata Camat Sungai Bahar, Agus Riyadi. Pihak gereja, Pendeta Ruyanto Situmorang juga memahami terkait kepemilikan lahan tersebut dan mengaku hendak mengajukan ganti rugi agar dibukakan jalan. Namun, pemilik lahan menolak ganti rugi. ● **pra**